

## ABSTRAKSI

*Nurhasanah* Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Politik Jepang (1942-1945)

Kebijakan politik Jepang terhadap kehidupan sosial politik umat Islam Indonesia mencerminkan sikap yang mendua (*ambivalen*). Jepang merangkul kekuatan-kekuatan politik dalam dengan maksud supaya di satu sisi, mendukung misi Perang Pasifik, yaitu dengan mengizinkan organisasi-organisasi Islam tetap berdiri dan melakukan kegiatannya—seperti mengesahkan berdirinya kembali Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang diganti namanya menjadi Masyumi, didirikannya Kantor Urusan Agama yang sempat ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda—serta mengajak para pemuda Islam untuk terlibat langsung memperkuat pasukan Jepang seperti dibentuknya laskar-laskar semi-militer (*Hizbullah*) yang tergabung dalam PETA. Di sisi lain, Jepang memaksa umat Islam untuk tunduk dan patuh kepada peraturan Nippon, dan melarang segala bentuk kegiatan yang bernuansa politik yang dilakukan oleh para pemimpin Islam dan nasionalis sekuler, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas politik mereka. Di samping itu juga Jepang memperlakukan sistem kerja paksa (*romusha*) yang sangat kejam kepada rakyat Indonesia, guna mendukung misi peperangan Asia Timur Raya yang mereka canangkan sejak awal kedatangannya di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Jepang.

Penelitian sejarah politik ini menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan melalui empat tahapan dalam metode penelitian sejarah, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam rangka mengungkap fakta-fakta sejarah yang berkenaan dengan kajian penelitian, penulis melakukan studi literatur.

Dari penelitian ini terungkap bahwa, kebijakan politik Jepang terlihat dari perpihakannya terhadap umat Islam, sebagai propaganda untuk mendukung pergerakan yang dalam Perang Asia Timur Raya. Di lain hal merupakan peluang yang besar bagi Muhammadiyah untuk mengembangkan gerakan pembaharuan pemikiran dan keagamaan, mengadaptasikan sistem pendidikan Islam dan Barat dan melembagakannya ke dalam sekolah-sekolah permanen, pencerdasan dan penyadaran politik umat, dakwah Islamiyah, dan aksi gerakan sosial keagamaan lainnya dalam rangka menyantuni dan membebaskan umat dari odohan dan keterbelakangan Muhammadiyah secara organisatoris terbukti mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya di masa Pendudukan Jepang.

Muhammadiyah menyadari betul bahwa kebijakan politik Jepang tidak selamanya menguntungkan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Gerakan Tiga A (yang Pelindung Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia) yang dijanjikan Jepang hanya sifat propagandis. Maka dari itu harus betul-betul disikapi secara arif, hati-hati dan penuh kritik. Ambivalensi sikap Jepang yang sangat tampak terhadap umat Islam—termasuk politisasi—ditanggapi oleh ulama Muhammadiyah sebagai sikap dan perilaku pemaksaan nasionalis penjajah yang ingin memecah belah umat Islam dan persatuan bangsa, dan diligis akan mengacaukan tekad untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Muhammadiyah membantu kebijakan politik Jepang yang menaruh perhatian terhadap terlangsungannya politik umat Islam Indonesia seperti yang tergambar di atas, yang pada akhirnya untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, tetapi Muhammadiyah secara tegas menolak doktrin Jepang sebagai bangsa pilihan beserta kesucian kaisar mereka yang minta perlakuan seperti halnya dewa, karena sikap tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip umat Islam.